

---

## HUBUNGAN PATRON-KLIEN DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GERINDRA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2014

Mochdar Soleman<sup>1</sup>, Kamaruddin Salim<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Politik, Universitas Nasional

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional

Email : mochedar.soleman@civitas.unas.ac.id, kamaruddinslm@gmail.com.

\*Korespondensi: kamaruddinslm@gmail.com

(Submission 07-11-2022, Revisions 25-11-2022, Accepted 28-11-2022)

### *Abstract*

*The existence of political parties in Indonesia has an important role in the democratic system. Political parties have several functions and one of them is political recruitment, namely a selection of candidates for legislative members to produce a quality leader. This study discusses the recruitment strategy by the Gerindra Party in conducting the regeneration of members of the Gerindra Party in Tidore Islands City. This study uses James Scott's Patron-Client Theory and Michael Rush and Philip Althoff's Political Recruitment Theory. The data in this study were obtained through interviews with party leaders and literature studies. This study describes that the Gerindra Party Branch Board of Tidore Islands City conducts political recruitment with a patron-client pattern. Where, patrons are associated with former activists, retirees and businessmen who have an organized mass, influence and economic capital. And clients, namely community groups who have social and cultural closeness will follow the political choices of their patrons. This study shows that the strategy model for recruiting legislative candidate figures from activists, retirees and entrepreneurs is still a popular strategy, but ignores the process of strengthening the resources of the party cadres themselves. This, of course, led to a crisis of regeneration within the party's internal.*

**Keywords:** *gerindra party; patron-client and political recruitment; political party; legislative.*

### **Abstrak**

Keberadaan partai politik di Indonesia mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Partai politik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya ialah rekrutmen politik, yaitu seleksi calon anggota legislatif untuk mencetak seorang pemimpin berkualitas. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi anggota Partai Gerindra di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan Teori Patron-Klien James Scott dan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Philip Althoff. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara ketua partai dan studi kepustakaan. Penelitian ini menguraikan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan melakukan rekrutmen politik dengan pola patron-klien. Di mana, patron

diasosiasikan dengan mantan aktivis, pensiunan dan pengusaha yang mempunyai massa teroganisir, pengaruh serta modal ekonomi. Dan klien yakni kelompok masyarakat yang mempunyai kedekatan secara sosial dan kultural akan mengikuti pilihan politik patronnya. Dalam penelitian ini menunjukkan model strategi rekrutmen figur calon anggota legislatif dari kalangan aktivis, pensiunan dan pengusaha masih menjadi strategi yang populer, namun mengabaikan proses penguatan sumber daya dari kader partai sendiri. Hal ini, tentunya menimbulkan krisis kaderisasi dalam internal partai.

**Kata Kunci:** partai gerindra; patron-klien dan rekrutmen politik; partai politik; legislative.

## PENDAHULUAN

Partai politik menjadi salah satu wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya. Keterlibatan warga negara dalam partai politik tentunya sesuai dengan fungsi partai, sebagai mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen politik (Danny Widodo Uji Prakoso, 2018: 2-3).

Hal ini senada dengan pandangan Syamsuddin Haris, yang menyatakan bahwa partai menjadi elemen penting dalam negara demokrasi. Bagi Haris, melalui partai politik masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan suatu negara. Partai politik sebagai lembaga politik mempunyai peran dan fungsi yang penting untuk merawat praktik demokrasi di suatu negara. Peran dan fungsi partai politik yang tidak efektif akan menimbulkan masalah atau tantangan bagi suatu negara demokrasi. Haris, menggambarkan partai merupakan fenomena baru dalam kehidupan bangsa Indonesia karena baru muncul pada era kolonial pada abad ke-20. Di mana, organisasi partai tumbuh bersama dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan dan semangat pencarian identitas nasional oleh lapisan elite baru produk politik etis pemerintah kolonial Belanda pada 1901 (Haris, 2014: 20).

Perkembangan partai politik di era keterbukaan dan demokrasi pasca-Soeharto, tidak dilarang pembentukan partai atas dasar identifikasi etnik dalam pengertian kesukuan tertentu yang bersifat eksklusif, namun hampir tidak ada partai baru yang benar-benar berbasis etnik seperti terjadi pada tahun 1955. Haris menggambarkan, dalam tiga tahapan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2004, pemilu tersebut berlangsung secara bebas, damai dan demokratis, walaupun pada awalnya ada kekhawatiran akan terjadinya konflik komunal dan agama yang sebelumnya pernah terjadi di sejumlah daerah seperti Maluku, Sulawesi Tengah dan Kalimantan (Haris, 2014: 26-27).

Kekhawatiran akan terjadinya konflik komunal tersebut, sesungguhnya mempunyai dasar. Karena, pasca reformasi muncul konflik komunal yang menjadi perhatian dunia, salah satunya ialah konflik Maluku dan Maluku Utara. Konflik ini yang kemudian melahirkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Maluku Utara yang sebelumnya menjadi Kabupaten dimekarkan menjadi provinsi berpisah dari provinsi induk yang berkedudukan di Ambon. Maluku Utara kemudian menjadi salah satu provinsi baru yang pernah dilanda konflik komunal pada tahun 1999-2000.

Maka, apa yang digambarkan oleh Syamsuddin Haris bahwa para pengamat mengkhawatirkan daerah Maluku sebagai salah satu daerah yang mengalami konflik komunal tentunya akan menjadi resisten bila dilakukan pemilu. Namun, kekhawatiran tersebut tidak menimbulkan terjadinya konflik komunal baru. Akan tetapi, dalam pilkada langsung Gubernur Maluku Utara tahun 2004 dan 2009, hal tersebut cukup menjadi perhatian, seiring dengan mencuatnya isu politik etnis dan patron-klien diantara kedua pasangan calon Gubernur yaitu Abdul Gafur (Patani-Tidore) dan Thaib Armayin (Makean-Ternate). Pola patron-klien ini menjadikan Abdul Gafur dan Thaib Armayin sebagai patron dari para elite politik, elite birokrasi dan kalangan pengusaha di Maluku Utara.

Hubungan patron-klien yang menggejala mulai dari pemilu 2004-2009 tersebut kemudian menyebar ke seluruh kabupaten/kota yang baru dimekarkan pasca Kabupaten Maluku Utara yang kemudian ditetapkan menjadi provinsi baru. Struktur politik di Maluku Utara pun mengalami perubahan dengan hadirnya partai baru dan dinamika politik yang berbeda. Bagi Haris, masalah yang dihadapi partai politik, diantaranya adalah pemimpin partai yang melestarikan problem struktural partai dan mengedepankan kekuasaan pribadi atau kelompok. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, yang menurut Haris, tidak pernah ada perdebatan serius di kalangan elite partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ke mana sesungguhnya arah sistem kepartaian pasca Orde Baru, dan partai politik yang tidak visioner dan cenderung membiarkan partai-partai merumuskan dirinya sendiri (Haris, 2014: 179-180).

Hubungan patron-klien sering menjadi salah satu sarana mobilisasi politik untuk menang dalam kontestasi politik di Indonesia. Hal ini memberikan gambaran bahwa hubungan patron-klien dalam rekrutmen politik dilakukan menjadi lazim dengan pertimbangan pada latar belakang seseorang, baik dari kalangan pengusaha, pensiunan polisi, pensiunan militer maupun mantan aktivis mahasiswa demi untuk mencapai kemenangan dalam setiap kontestasi politik dan mendapat dukungan dari basis massa para individu tersebut serta mempunyai finansial yang cukup untuk maju sebagai calon anggota legislatif dan pemimpin publik. Sebagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan dalam Pemilu Legislatif 2014, di mana pola rekrutmen calon anggota legislatif memprioritaskan dari kalangan pengusaha, pensiunan polisi dan mantan aktivis mahasiswa. Pola rekrutmen yang ada tersebut memberikan gambaran hubungan patron-klien dalam partai politik dianggap sebagai faktor penentuan calon anggota legislatif yang potensial.

Fenomena patron-klien dalam partai politik menunjukkan bahwa partai politik sendiri tidak melakukan kaderisasi politik yang baik di internal. Sehingga partai merekrut pihak di luar partai yang diidentifikasi sesuai dengan latar belakang ekonomi yang mapan dan basis massa riil dalam komunitas maupun masyarakat. Latar belakang calon yang menjadi dasar partai merekrut para calon menjadikan adanya proses patron-klien dalam kehidupan politik. Hubungan patron-klien dalam penentuan calon anggota legislatif DPRD Kota Tidore Kepulauan tentunya bisa memberikan gambaran dinamika perpolitikan di Indonesia dimana partai politik

saat ini tidak menghilangkan pola patronase dalam aktivitas partai. Karena itulah, pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hubungan Patron-Klien yang digunakan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan dalam rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Kota Tidore Kepulauan 2014?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan subyek penelitian hubungan patron-klien dalam rekrutmen calon calon legislatif partai Gerindra pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Tidore Kepulauan tahun 2014. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang dapat membantu penulis untuk menguatkan argumen dalam penelitian ini, seperti: buku, jurnal dan hasil riset sebelumnya yang terkait dengan topik dan pemberitaan media massa online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hubungan patron-klien dalam kontestasi politik bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Pola patronase partai adalah penggunaan sumber daya publik dalam pertukaran partikularistik dan langsung antara klien dan politisi partai atau fungsionaris partai. Partai mengidentifikasi klien mereka secara individual dan terlibat dalam hubungan pertukaran layaknya kontrak. Para politisi menyediakan beragam barang dan jasa untuk diganti dengan dukungan suara dari masyarakat. Patronase partai disamakan untuk tujuan resmi sosial sebagai penerapan norma. Hubungan patronase tidak melanggar norma-norma hukum. Namun, klien yang menerima barang dan jasa publik memahami bahwa koneksi mereka dengan partai menjadi penting untuk tujuan itu. Koneksi partai menjadi penting karena birokrasi tidak efisien dan tidak responsif, atau karena koneksi tersebut dapat membantu menggunakan kebijaksanaan administratif untuk kepentingan klien, sampai pada titik melanggar aturan (Katz dan Crotty, 2015: 311).

James C. Scott menggambarkan patron-klien itu adalah hubungan dua orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi lebih tinggi (patron). Bagi Scott, patron menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya agar dapat dialokasikan untuk perlindungan dan keuntungan orang lain yang disebut klien. Menurut Scott, alokasi sumber daya dari patron kepada klien, mendorong klien memberikan dukungan, termasuk layanan pribadi kepada patron. Poin penting dalam kelompok patron-klien ialah hubungan kekuasaan, di mana patron mempunyai kekuasaan atas klien. Karena patron memiliki kemampuan, status sosial, kekayaan dan pengaruh dalam masyarakat dibandingkan kliennya. Dengan sumber daya yang dimilikinya, patron dapat memengaruhi klien untuk membutuhkan bantuannya dan para klien membalasnya dengan memberikan dukungan dan pelayanan kepada patron (Rauf, 2001: 99).

DPC Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan dalam rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan dengan merekrut mantan aktivis mahasiswa, peniunan serta pengusaha. Proses rekrutmen para aktivis, peniunan dan pengusaha tersebut kemudian membawa dampak positif bagi Partai Gerindra yang berhasil meraih dua kursi di DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam pemilu legislatif 2014. Proses rekrutmen calon anggota DPRD dengan mengedepankan figur yang mempunyai latar belakang ekonomi yang mapan dan figur yang mempunyai pengaruh di tingkat mahasiswa dan masyarakat, menunjukkan bahwa partai politik tersebut membutuhkan patron yang mempunyai pengaruh dan sumber daya ekonomi yang besar.

Partai politik, salah satu aktor utama dalam proses politik tentunya mempunyai pertimbangan mencalonkan mantan aktivis, peniunan dan pengusaha. Sebagaimana diuraikan Scott yang menggambarkan patron-klien adalah hubungan dua orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi lebih tinggi, maka mereka yang dijadikan sebagai calon anggota DPRD tersebut bisa dinyatakan merupakan patron dalam masyarakat. Hal ini dapat diidentifikasi melalui status sosial dan ekonomi, serta sumber daya yang mereka miliki.

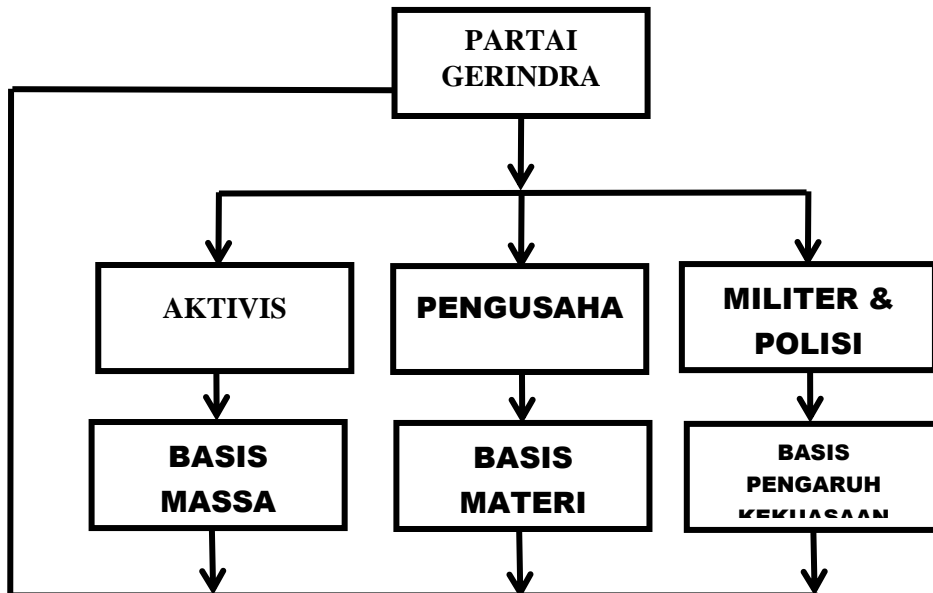
Pertimbangan DPC Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan merekrut para patron sangat rasional, karena tujuannya untuk meraih kursi di DPRD Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Afan Gaffar, bahwa para patron memiliki sejumlah sumber daya yang dapat dipertukarkan satu sama lain yang saling menguntungkan terutama dalam proses politik. Namun demikian, hubungan tersebut dapat berubah dalam proses politik. Antara patron dan klien bisa merasa bahwa hubungan tersebut tidak lagi menguntungkan sehingga patron mencari klien dan klien akan mencari patron yang baru baginya (Gaffar, 1991: 85).

Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik pendatang baru dalam panggung politik Indonesia yang terbentuk pada Desember tahun 2007. Tokoh-tokoh pendiri partai antara lain: Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Fadli Zon dan Muchdi Purwoprandjon. Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Partai Gerindra didirikan dengan dasar pikir, mayoritas rakyat masih dalam penderitaan. Lebih lanjut menurut Prabowo, sistem politik tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari kemelaratan; bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar yang berakibat menggelembungnya jumlah rakyat miskin dan menganggur. Cita-cita Prabowo Subianto melalui pendirian Partai Gerindra sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari kemelaratan. Gerindra menjadi alat perjuangan bersama rakyat (Kandowanko dkk, 2019: 306-307).

Hal ini kemudian menginspirasi DPC Gerindra Kota Tidore Kepulauan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, salah satunya dengan melakukan program partai yang sesuai garis partai dan merekrut kader yang mempunyai kualitas dan mempunyai modal sosial dan ekonomi yang baik. Gerindra sebagai partai baru dalam percaturan politik Indonesia, mempunyai berbagai tantangan dalam kontestasi politik nasional maupun tingkat lokal. Tantangan sebagai partai

baru pasca reformasi membuat Gerindra menguatkan struktur partai dengan kader yang mempunyai. Salah satu target politik yang dilakukan adalah memenangkan partai dalam setiap kontestasi politik dari pusat sampai di daerah.

Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu 2014 berdampak positif pada tingkat lokal, yakni Kota Tidore Kepulauan. Di Kota Tidore Kepulauan, Partai Gerindra memperoleh 4.912 suara dan berhasil menempatkan 2 orang kadernya sebagai anggota legislatif Kota Tidore Kepulauan. Kedua orang tersebut dianggap sebagai patron, karena satu dengan latar belakang sebagai mantan aktivis organisasi mahasiswa dan satu lagi sebagai pensiunan polisi yang memiliki pengaruh di masyarakat. Adapun hubungan patron klien dalam proses rekrutmen politik calon anggota DPRD Partai Gerindra di Kota Tidore Kepulauan bisa digambarkan sebagaimana Gambar 1:



**Gambar 1.** Hubungan Patron-Klien Dalam Proses Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan.

Bagan pada Gambar 1 memberikan gambaran bahwa kaitan dengan hubungan patron-klien dalam perekrutan calon anggota legislatif oleh DPC Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019 dapat dipahami sebagai bentuk-bentuk patronase dan klientalisme. Pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra terbilang berhasil karena bisa meloloskan dua kader partai mereka sebagai anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019.

Di Indonesia, studi tentang relasi patronase dalam sistem kekerabatan belum begitu banyak dilakukan kecuali pada masa kontemporer (Aslia Zainal, 2021: 28-29). Kajian patronase yang spesifik menjelaskan mengenai sesuatu yang menyangkut materi yang diberikan oleh patron kepada klien, sehingga praktik

patronase yang berlaku dalam proses politik menunjukkan bentuk praktik politik kekerabatan.

Gejala patronase dalam banyak masyarakat dapat bekerja dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Karenanya, fenomena rekrutmen politik yang menggaet mantan aktivis organisasi mahasiswa, pensiunan dan pengusaha bisa dipahami sebagai upaya merekrut figur yang dapat mendulang suara signifikan dalam pemilu.

Namun, di sisi lain politik kekerabatan di Tidore sangatlah kuat dengan adanya istilah politik *gam-gam* (kampung). Hal ini juga menandakan adanya proses yang *mandeg* dalam dinamika politik lokal di Tidore karena politik kekerabatan yang dipraktikkan memberikan praktik budaya politik yang tidak cerdas. Sementara, bila dipahami dari sejarah perjalanan praktik politik kekerabatan yang berkembang di Tidore, justru lebih cenderung melibatkan aktor dan struktur, serta menyeret penguatan ego atas tradisi dari masing-masing etnis yang ada di kampung atau *gam-gam* di Tidore (Salim, 2019: 210).

Selain itu, keterlibatan aktor birokrat sebagai peran kelompok lapangan tengah yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dan jejaringnya jauh lebih efektif daripada partai politik. Pemetaan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa dominasi aktor informal dan struktur formal dalam kontestasi atas semangat politik kekerabatan dalam Pemilu serentak di Tidore, dapat dilihat dari sampai sejauh mana usaha para aktor tersebut dalam membangun isu di kampung-kampung dalam upaya untuk memetakan masyarakat pemilih berdasarkan garis keturunan dari para kontestan yang tampil sebagai calon anggota legislatif. Tidak ada yang bisa menepis, betapa politik kekerabatan dapat terlihat dengan hadirnya para calon yang diusung oleh partai berbasis pada pembagian wilayah atau putra asli kampung itu sendiri.

Terkait dengan peran kekuatan lapangan tengah, yang dalam hal ini adalah para aktor kampung yang mewakili kelompok dari kampung atau *gam-gam* masing-masing kandidat, mereka juga terus berupaya untuk melembagakan kekuatan politiknya. Walau secara struktur politik tidak dipandang serupa lembaga partai, namun kekuatan ini mampu memetakan kekuatan politik para kandidat yang secara politik berbasis pada politik kekerabatan (Salim, 2019: 211).

Rekrutmen politik oleh Michel Rush dan Phillip Althoff digambarkan sebagai sistem perekrutan politik yang mempunyai lima model rekrutmen politik, yakni: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Rekrutmen politik adalah proses dengan mana individu-individu menjamin dan mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen politik ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun non formal. Merupakan proses dua arah, karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu (Salim & Efriza, 2019 : 34).

Menurut Rush dan Althoff, daya ketersediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi rekrutmen politik, kriteria yang digunakan dan sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan

politik menetapkan berbagai macam kriteria, seperti ciri dan keterampilan yang dianggap layak dan harus dikuasai oleh calon pemimpin yang diusung. Kriteria ini tentu akan mencerminkan permintaan yang merupakan representasi atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif. Bagi Rush dan Althoff, rekrutmen politik diasosiasikan dengan perubahan personal yang besar dan diasosiasikan dengan rekrutmen yang berkesinambungan dari model personal yang sama. Dan, salah satu sarannya adalah patronase (Rush dan Althoff, 2013: 186).

Pada masa Orde Baru, proses rekrutmen politik sangatlah tertutup dan dominannya lembaga kepresidenan. Dominasi lembaga kepresidenan tersebut berdampak terhadap proses rekrutmen pemimpin yang didasarkan atas hubungan patronase politik, bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan. Hal ini terlihat dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah. Demikian pula proses rekrutmen di tingkat lokal, seperti proses pemilihan gubernur/kepala daerah, masyarakat di daerah tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan. Karena yang akan menjadi gubernur ditentukan oleh kekuatan yang berada di pusat pemerintahan.

Pada masa reformasi, perubahan ini tidak terlalu signifikan. Politik patronase masih ada. Satu perubahan yang paling menonjol dalam rekrutmen politik di era reformasi bukan terletak pada dominannya lembaga kepresidenan, akan tetapi terletak pada dominannya ketua partai penguasa (Sukmana dan Arsyiah, 2013: 159).

Memang, dalam tubuh organisasi partai politik sudah sewajarnya terdapat strategi rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Hal ini berfungsi untuk reformasi dalam regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah proses rekrutmen pengusaha, pensiunan polisi dan tokoh aktivis. Proses rekrutmen politik dengan mempertimbangkan faktor patronase menjadi satu hal yang dianggap penting dalam Pemilu legislatif 2014 dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan berhasil meraih dua kursi di parlemen. Menurut Jubeda Kamal, Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan, pola rekrutmen calon anggota DPRD dari DPC Partai Gerindra dilakukan pada tahun 2014 tentunya mempertimbangkan faktor latar belakang, dari kalangan pengusaha dan pensiunan polisi ataupun tokoh masyarakat khususnya mantan aktivis mahasiswa. Bagi Jubeda, saat ini Partai Gerindra fokus untuk merekrut tokoh pemuda. Alasan memilih merekrut tokoh aktivis sebagai representasi pemuda tentunya mempunyai kemampuan untuk mengajak atau memengaruhi kalangan milenial dan masyarakat untuk memilih Partai Gerindra. Dan ini memang menjadi target kami untuk pemilu mendatang (*Wawancara Jubeda Kamal, Ketua DPC Gerindra Kota Tidore Kepulauan via telepon pada hari Rabu 21 April 2021, pukul 05.30 WIB*).

Apa yang dipaparkan oleh Jubeda Kamal selaku Ketua Partai DPC Gerindra Kota Tidore Kepulauan dengan menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya merupakan partai yang masih baru bila dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Gerindra meyakini bahwa dengan melakukan perekrutan mantan aktivis mahasiswa



dapat mendistribusikan pengaruh partai ke kalangan mahasiswa maupun anak muda. Mantan aktivis mahasiswa dianggap memiliki massa dan mampu menampung aspirasi anak-anak muda dan mengakomodasi aspirasi tersebut. Masyarakat akan optimis bahwa dengan adanya tokoh-tokoh muda dalam skema rekrutemen calon anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, sekaligus sebagai bentuk kaderisasi calon pemimpin politik atau pemerintahan di kota Tidore Kepulauan.

Apa yang diuraikan Jubaeda, dalam perspektif Rush dan Althoff sebagaimana diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa perekrutan partai Gerindra di Kota Tidore Kepulauan memiliki sifat khusus. Misalnya perekrutan administratif diperlukan untuk dasar bagi patronase pada saat proses rekrutmen. Sistem patronase juga sering dikenal sebagai *sistem kawan*, di mana dalam pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu dengan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak keluarga, maupun karena domisili yang sama. Sistem tersebut juga didasarkan atas dasar perjuangan politik, misalnya memiliki ideologi, keyakinan, dan aliran yang sama tanpa memperhatikan keahliannya dan keterampilannya. Rekrutmen politik meliputi aspek subyek politik dalam arti manusia, dan objek politiknya yaitu partai politik. Rekrutmen politik dapat dilakukan dengan cara yang dikehendaki partai, baik secara tertutup atau secara terbuka.

## SIMPULAN

Praktik patron-klien dalam proses rekrutmen politik dalam partai politik, dapat dipahami sebagai pola patron klien yang berpijak pada tiga faktor, yakni, *Pertama*, ketidakseimbangan dalam pertukaran, di mana patron sebagai pemberi materi atau jasa yang diperlukan bagi klien dan ataupun partai. Maka, partai merasa perlu membalas kebaikan patron tersebut. Selama patron masih mampu memenuhi kebutuhan klien, maka dirinya tetap menjadi patron yang disegani. *Kedua* hubungan patron klien adalah hubungan pribadi yang didasari rasa saling percaya, tanpa perjanjian tertulis ini yang menjadi salah satu faktor penting dalam relasi yang dibangun dalam hubungan antar aktor maupun antar kelompok masyarakat. *Ketiga* adalah sifatnya yang bebas dan tidak hanya pada kebutuhan tertentu, tetapi meluas pada berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan partai.

Hubungan patron-klien merupakan sebuah strategi bagi partai yang bertujuan untuk mengakses sumberdaya yang telah dimiliki oleh masing-masing orang yang direkomendasikan menjadi calon anggota legislatif. Pola rekrutmen berbasis pada patron-klien ini menjadi strategi efektif dalam menyikapi mengendurnya loyalitas di masyarakat terhadap partai, karena patronase memungkinkan partai yang dipilih untuk menunjuk anggota dari pemilih atau konstituennya untuk menduduki posisi-posisi penting. Hubungan patron-klien dalam pola perekrutan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPC Gerindra Kota Tidore Kepulauan dalam Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan bahwa, pendidikan politik serta kaderisasi politik di internal Partai Gerindra belum berjalan baik. Kemudian, mendorong partai cenderung merekrut orang-orang yang secara sosial

dan ekonomi mempunyai posisi, modal ekonomi dan sumber daya yang cukup untuk bergabung ke Partai Gerindra.

## DAFTAR PUSTAKA

- C. Muller, Wolfgang. (2015). *Patronase Partai dan Kolonisasi Partai atas Negara*. Lihat: Richard S Katz dan William Crotty dalam Handbook Partai Politik. Bandung: Nusa Media.
- Fadiyah, Dina dan Ummi Zakiyah. (2018). *Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia*. MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No. 2.
- Gaffar, Afan. (1991). *Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahirnya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr.Yahya Muhaimin*. 10.X1.IV. UNISIA.
- Heart Kandowanko, Carry. Pamerdi Giri Wiloso dan Elly E. Kudubun, *Kiprah Politik Partai Gerindra. Studi Tentang Strategi Pemenangan Calon Legislatif Terpilih Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 di Kota Salatiga*. <https://ejournal.uksw.edu>.
- Haris, Syamsuddin. (2014). *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, Syamsuddin. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Salim, Kamaruddin dan Efriza. (2019). *Sosiologi Politik. Sejarah, Analisis, dan Dinamika Perkembangan Konsep*. Malang: Intrans Publishing.
- Salim, Kamaruddin dan Efriza. (2019). *Partisipasi Politik dan Dinamika Demokrasi di Tidore Maluku Utara*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Volume 4, Nomor 7.
- Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik Cetakan ke-15*. Jakarta: RajaGrafinfo Persada.
- Sukmana, Hendra dan Arsiyah. (2013). *Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo*. JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, September.

Zainal, Asliah. (2021). *Relasi Kekeabatan Patronase Masyarakat Muna*. Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian. Vol 16, No. 1, Mei.

### **Jurnal**

Prakoso, Danny Widodo Uji dan Laila Kholid Alfirdaus, *Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017*. Journal of Politic and Government Studies 2018

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Jubaida Kamal Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan via telephon pada hari Selasa 20 April 2021 pukul 08.30 dan hari Rabu 21 April 2021. Pukul 05.30 WIB.